

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan kekayaan hasil alam yang cukup melimpah. Kesuburan alam Indonesia didukung kuat oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Namun kenyataan yang terjadi sebagian besar penduduk Indonesia masih berada dalam ekonomi menengah kebawah. Kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi merupakan akibat ketidakmampuan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi yang banyak mengabaikan hak-hak kemanusiaan, salah satu hak kemanusiaan adalah kemandirian. Kemandirian adalah seseorang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mewujudkan keinginan dirinya yang terlihat dari tindakan nyata untuk menghasilkan barang atau jasa demi pemenuhan kehidupan diri dan sesama¹.

Ciri kemandirian adalah percaya diri, mampu bekerja sendiri, menguasai keahlian dan keterampilan sesuai dengan pekerjaan, menghargai waktu dan tanggung jawab.² Dewasa ini, di era globalisasi seperti saat ini kemandirian harus dimiliki oleh semua orang, salah satunya adalah perempuan. Tahun-tahun belakangan ini, tindak kekerasan terhadap perempuan semakin memprihatinkan,

¹Babari, 2003. *Kompetensi, Komitmen, Dan Intrapreneurship Pustakawan Dalam Mengelola Perpustakaan Di Indonesia*: Bina Nusantara Digital Library .Hlm. 05

² Ibid. Hlm 07

hampir setiap hari di media masa (cetak, elektronik) mengungkapkan kekerasan terhadap perempuan. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah masalah ekonomi atau kemiskinan dan sosial. Dilansir dari sebuah media online mengatakan bahwa sekitar 24 juta perempuan dari 217 juta penduduk Indonesia terutama di pedesaan mengakui pernah mengalami kekerasan dan yang terbesar adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga merupakan situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan.³

Dilansir dari berita online liputan6.com bahwa Provinsi Jawa Tengah termasuk Provinsi termiskin kedua di Pulau Jawa, posisi pertama diduduki oleh provinsi Jawa Timur dengan 4,78 juta jiwa, Jawa Tengah meski lebih dari 20 ribu penduduk terangkat dari garis kemiskinan sejak awal tahun 2015, Jawa Tengah tetap memiliki jumlah penduduk miskin terbesar kedua di Indonesia, yakni 4,58 juta jiwa. Batas pendapatan untuk kategori miskin di Provinsi ini berkisar 310 ribu

³Wahab Rochmat, 2013, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif*, hlm 27

rupiah per bulan. Bicara soal kemiskinan di Jawa Tengah, setidaknya terdapat 15 kabupaten termiskin dari jumlah total 35 kabupaten atau kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu Kabupaten termiskin yang ada di Jawa Tengah adalah Kabupaten Purworejo dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 mencapai 10.211 jiwa dengan presentase penduduk miskin mencapai 14.41% di tahun yang sama.⁴ Berikut adalah tabel yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 1
Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2014

Kabupaten/Kota		Jumlah Pddk Miskin (000 org)						Persentase Pddk Miskin					
		<i>Number of Population</i>						<i>Percentage of Population</i>					
Regency/Municipality		<i>Below of Poverty Line (Thousand)</i>						<i>Below of Poverty Line</i>					
		2012		2013		2014		2012		2013		2014	
Kabupaten/Regency													
1.	Cilacap	265.70		255.70		239.75		15.92		15.24		14.21	
2.	Banyumas	309.80		296.80		283.48		19.44		18.44		17.45	
3.	Purbalingga	184.90		181.10		176.04		21.19		20.53		19.75	
4.	Banjarnegara	167.00		166.80		159.48		18.87		18.71		17.77	
5.	Kebumen	262.80		251.10		242.31		22.40		21.32		20.50	
6.	Purworejo	114.80		109.00		102.11		16.32		15.44		14.41	

⁴Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

7.	Wonosobo	172.40	170.10	165.83	22.50	22.08	21.42
8.	Magelang	169.40	171.00	160.48	13.97	13.96	12.98
9.	Boyolali	131.50	126.50	118.58	13.88	13.27	12.36
10.	Klaten	191.30	179.50	168.18	16.71	15.60	14.56
11.	Sukoharjo	85.70	84.10	78.85	10.16	9.87	9.18
12.	Wonogiri	137.90	132.20	123.85	14.67	14.02	13.09
13.	Karanganyar	117.40	114.40	107.29	14.07	13.58	12.62
14.	Sragen	145.30	139.00	130.28	16.72	15.93	14.87
15.	Grobogan	214.60	199.00	186.53	16.14	14.87	13.86

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Kemiskinan juga merupakan sebuah permasalahan yang menjadi sorotan banyak pihak, hal ini wajar mengingat bahwa sudah banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Banyaknya orang miskin membuat permasalahan sosial meningkat, kesenjangan sosial turut memicu timbulnya persoalan yang sangat kompleks di masyarakat.

Perempuan sebagai salah satu unsur dimasyarakat terutama istri memang sebaiknya tidak bergantung sepenuhnya urusan ekonomi kepada suami, karena suami akan merasa menguasai istri dan bertindak semena-mena. Pada saat sekarang ini pergerakan dan perjuangan kaum wanita Indonesia menunjukkan semakin maju

serta meningkat. Pergerakan dan perjuangan tersebut bukan sekedar dimaksudkan untuk mendapatkan persamaan kedudukan dan hak semata-mata dengan kaum pria, namun juga untuk lebih dapat melakukan perannya di dalam kehidupan keluarga, masyarakat serta pemerintahan.

Kaum wanita kini semakin menyadari bahwa wanita sebagai salah satu kekuatan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang tidak kalah pentingnya dengan kekuatan masyarakat lainnya, dan karenanya mempunyai tanggung jawab bersama melakukan peranannya dalam masa pembangunan. Memang peranan wanita yang pada hakikatnya mempunyai potensi cukup tinggi belum memadai, walaupun mulai permulaan tahun 1900 kaum wanita telah mengadakan perkumpulan-perkumpulan pergerakan wanita, perkumpulan-perkumpulan wanita pada saat itu umumnya masih bersifat kedaerahan (jawa) atau berasaskan agama seperti Aisyah dan Wanita Katolik. Kini di era modernisasi, juga merupakan sebab mengubah pandangan masyarakat terhadap kedudukan serta peranan wanita dan ibu-ibu baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.

Salah satu pergerakan perempuan di Indonesia yang saat ini masih berperan aktif adalah PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan, bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai

fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, termasuk didalamnya sebagai mitra kerja pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan.

PKK dalam membantu meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan dilakukan melalui kegiatan:

- a. Penyuluhan dan sosialisasi
- b. Komunikasi, informasi dan edukasi dan
- c. Fasilitasi dan pendampingan.⁵

PKK adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga berperan dalam kegiatan pertumbuhan daerah. PKK adalah suatu gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Tim Penggerak PKK berada di tingkat pusat sampai dengan

⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.

desa/kelurahan, PKK dikelola dan digerakkan oleh Tim Penggerak PKK yang diketuai oleh istri Pimpinan Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah), secara fungsional dapat dikemukakan bahwa kunci berkembangnya program dan kegiatan PKK, justru ada peran nyata diwujudkan oleh istri Pimpinan Daerah.⁶

Anggota Tim Penggerak PKK adalah para istri dari aparatur desa atau para ibu-ibu dengan pekerjaan PNS, yang tidak menerima gaji dan menyediakan sebagian dari waktunya untuk PKK. Walaupun Sasaran PKK adalah keluarga, khususnya ibu rumah tangga, perempuan, sebagai sosok sentral dalam keluarga. Ia tidak hanya mengurus soal kehidupan rumah tangganya dan mengasuh anak saja. Banyak diantara ibu rumah tangga yang membantu perekonomian keluarganya dengan bercocok tanam hingga berdagang. Seperti program-program di salah satu PKK Kelurahan yaitu di Kelurahan Dopleng, Kecamatan Purworejo yang terletak di Kabupaten Purworejo. Kelurahan Dopleng membuat program-program yang membuat perempuan-perempuan desa lebih mandiri dan tidak bergantung kebutuhan ekonomi sepenuhnya kepada suami.

Di PKK Kelurahan Dopleng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo ini memiliki beberapa program untuk membantu ibu-ibu pada khususnya untuk mendapatkan pelajaran dan pelatihan yang nantinya pelajaran itu bisa diterapkan

⁶ Joan F Rantung, Jantje Mandey, Verry Y Londa, 2011. *Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Ongkau I Kabupaten Minahasa Selatan)*, hlm 12

di keluarganya serta pelatihan-pelatihan yang hasil akhirnya berbentuk kerajinan atau olahan makanan yang akan diperjualbelikan sehingga akan mendapatkan keuntungan yang nantinya berdampak pada perekonomian keluarganya. PKK Kelurahan Doplang ini memang membuat program-program yang mengarah kepada kemandirian para perempuan di desanya, dikutip dari berita resmi website Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, Berdasarkan analisis dan data tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K), mengatakan bahwa Kelurahan Doplang dikategorikan salah satu desa miskin padahal letaknya berada di dekat pusat kota.

Desa ini juga termasuk desa dengan tingkat KDRT tertinggi di Kabupaten Purworejo, ujar Kasubag Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan pada Bagian Kesra Setda, Sigit Joko Purnomo M.Si dalam berita di website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, Plt Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BKBPP, Dra Titik Mintarsih MPd menambahkan, pada 2013 kasus KDRT yang ditangani P2TP2A hanya 25 kasus. Jumlahnya melonjak di 2014 yang mencapai 40 kasus, terdiri dari 27 kasus dengan korban anak-anak, dan 13 kasus dengan korban dewasa, termasuk dua orang laki-laki. Selain itu Kelurahan ini juga Kelurahan dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi padahal terletak di Kota. Maka dari itu PKK Desa ini memang mengarahkan dan menginisiasi program-programnya dengan tujuan mengoptimalkan kemandirian perempuan desa. Program yang diinisiasi oleh PKK Kelurahan Doplang ini antara lain seperti memanfaatkan sampah daur ulang sebagai bahan kerajinan, hasil daur

ulang limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu-ibu PKK kelurahan Doplang yaitu kerajinan yang berasal dari plastik bungkus deterjen, permen, pewangi pakaian dan plastik-plastik sejenisnya kemudian dijadikan barang kerajinan berupa tas. Selain memanfaatkan daur ulang dari plastik-plastik bekas, selain itu PKK ini membuat kerajinan bros dan gantungan kunci dari kain flannel, PKK Kelurahan Doplang ini juga membuat pelatihan pembuatan keset dari kain perca dan kain-kain sisa.

Hanya saja masalahnya kini terletak pada bagian pemasarannya, olahan kerajinan dari PKK Kelurahan Doplang ini masih kalah saing dengan produk-produk buatan pabrik. Karena pembuatan kerajinan oleh ibu-ibu PKK yang masih manual dan tradisional, sedangkan buatan pabrik memang lebih murah dikarenakan pembuatannya dalam jumlah besar dan sudah memakai mesin-mesin canggih sehingga lebih menghemat biaya.

Selain masalah persaingan produk, menurut ibu Rohani yang merupakan salah satu anggota dari PKK ini, bahwa anggota PKK Kelurahan Doplang ini pun belum mencakup keseluruhan masyarakat khususnya perempuan di kelurahannya, yang artinya tingkat ketertarikan kaum perempuan di kelurahan ini masih kurang terhadap PKK, karena dari 805 kepala keluarga dengan jumlah laki-laki sebanyak 1599 dan perempuan sebanyak 1751 dengan jumlah perempuan yang sudah menikah sebesar 830 orang, tetapi anggota yang aktif hanya sekitar kurang lebih 150 orang, dan apakah nantinya PKK Kelurahan Doplang dapat mengoptimalkan program-programnya untuk ikut andil dalam kemandirian

perempuan desa, apalagi PKK Kelurahan Dopleng memiliki banyak program-program untuk membantu kemandirian perempuan, juga PKK ini memiliki beberapa prestasi seperti pada saat diselenggarakannya lomba oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermades) Provinsi Jawa Tengah, PKK ini mendapatkan juara 3 dan mengalahkan hampir 8.576 Desa atau Kelurahan se-Jawa Tengah. Lomba ini terkait dengan penilaian administrasi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pembangunan. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya peran PKK Kelurahan Dopleng ini dalam mengoptimalkan kemandirian perempuan desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasar dari latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Tim Penggerak PKK Kelurahan Dopleng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Dalam Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016?”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah peran Tim Penggerak PKK Kelurahan Dopleng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Dalam Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan memberi kontribusi positif terhadap pengembangan studi politik lokal dan pemerintah daerah khususnya mengenai pembangunan yaitu pengoptimalisasian kemandirian perempuan desa oleh salah satu organisasi wanita yaitu PKK.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi terhadap penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi diri pribadi dapat memberikan pengetahuan lebih tentang PKK dan perempuan.
- 2) Bagi masyarakat secara umum dapat memberikan pemahaman tentang peranan dan pengaruh PKK terhadap masyarakat khususnya pada perempuan.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Peran

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Peranan terdapat dua macam harapan, yaitu:

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.⁷

Adapun makna dari kata “peran” dapat dijelaskan lewat beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama. Kedua, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan atau unjuk peran (role performance). Hubungan antara pelaku atau aktor dan pasangan laku perannya (role partner) bersifat saling terkait dan saling mengisi, karena

⁷Soejono Soekamto, 2013. *Bagaimana Perempuan Merespon Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kasus Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Indonesia*. Hlm 56

dalam konteks sosial, tak satu peran pun dapat berdiri sendiri tanpa yang lain.⁸

Kendati “peran” merupakan gagasan sentral dari pembahasan tentang teori peran, ironisnya, kata tersebut lebih banyak mengundang silang pendapat di antara para pakar, yang paling sering terjadi adalah bahwa “peran” dijelaskan dengan konsep-konsep tentang pemilihan perilaku, seperti yang sudah diuraikan. Namun demikian, definisi yang paling umum disepakati adalah bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.

Peran juga memiliki arti serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan secara formal maupun secara informal. Peran dilakukan berdasarkan pada ketentuan dan harapan yang menerangkan apa saja yang harus dilakukan individu dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain yang menyangkut peran tersebut.⁹

⁸ Edy Suhardono, 2000. *Teori Peran Konsep, Derivasi dan implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal 3

⁹ Ibid hlm 07

Menurut pendapat dari Astrid S. Susanto, peranan mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu: ¹⁰

- a. Peranan adalah meliputi sarana yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat. Peranan dalam hal ini menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang kedalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai masyarakat.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting didalam struktur sosial.

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹⁰ Edy Suhardono, 2000. *Teori Peran Konsep, Derivasi, dan implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal 13

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam pandangan David Berry dalam Sayaiiful Bahri Djamarah tahun 2009, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. Peranan diidentifikasi sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus¹¹

Berdasarkan pelaksanaannya peranan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (*expected roles*) cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secara cermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatic, dan sebagainya.

¹¹ YR Mawarni, 2015. *Peranan Yayasan PKPA Dalam Usaha Meningkatkan Kemandirian Masyarakat*, hlm 11

2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat ¹²

2. Organisasi Wanita

Dalam bidang organisasi untuk menunjang program peningkatan peranan wanita Indonesia dalam pembangunan, pemerintah telah membentuk berbagai organisasi wanita yang secara garis besar dikategorikan menjadi:

1. Para istri pegawai negeri dikelompokkan dalam Dharma Wanita
2. Para istri anggota ABRI dikelompokkan dalam Dharma Pertiwi
3. Bagi para ibu rumah tangga di daerah pedesaan dan di kota yang bukan istri pegawai negeri/istri ABRI diciptakan organisasi PKK yang secara eksplisit dinyatakan oleh GBHN 1983 sebagai salah satu organisasi wanita untuk mendorong partisipasi wanita Indonesia dalam pembangunan ¹³

Ayu Ratih dalam W Pangestoeri tahun 2014 mendefinisikan gerakan perempuan sebagai usaha untuk menerobos batasan yang memisahkan persoalan ketertindasan perempuan dan ketertindasan manusia secara

¹² Narwoko dan Suyanto, 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana, Jakarta, hal 159

¹³ W Pangestoeri, 2014. *Perempuan Dalam Pemerintahan*, hlm 12

keseluruhan. Ini berarti gerakan perempuan harus menyusun strategi tentang bagaimana memberi warna perempuan pada setiap gerakan pembebasan yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam tata hubungan antar manusia yang beradab.¹⁴

James L. Gibson c.s. dalam Indah Ahdiah tahun 2011 menyatakan bahwa organisasi-organisasi dicirikan oleh perilaku yang di arahkan ke arah pencapaian tujuan. Mereka mengupayakan pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran, yang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan lebih efisien. Hal itu melalui tindakan-tindakan individu-individu serta kelompok-kelompok secara terpadu. Organisasi perempuan berdasarkan identifikasi DAWN (*Development Alternatives With Women For a New Era*) terdapat enam macam mulai dari yang sangat tradisional hingga organisasi dengan analisis dan agenda feminis khusus.

1. Organisasi perempuan tradisional, seringkali sudah lama berdiri, cenderung berkuat disekitar peran gender tradisional, meski membuat prestasi penting dalam bidang pendidikan perempuan, kesehatan dan pelayanan-pelayanan terkait, dan mungkin memiliki pendekatan “patronase”. Kekuatannya terletak pada akses mereka terhadap sumber

¹⁴ Ibid. hlm. 14

daya dan pembuat keputusan kendati mereka mungkin tidak selalu mengeksploitasi jalinan ini.

2. Organisasi perempuan yang berafiliasi dengan partai politik, organisasi semacam ini mungkin memiliki persoalan dalam menegaskan agendanya sendiri, yang bersumber dari kekhawatirannya dianggap memecah belah.
3. Organisasi yang berbasis pekerja termasuk serikat buruh dalam sektor formal dan organisasi wiraswasta perempuan miskin. Organisasi ini biasanya memusatkan perhatian kepada masalah-masalah seperti kondisi pekerjaan serta tersedianya kredit, tetapi kemudian melangkah ke agenda feminis yang lebih eksplisit seperti pengasuhan anak, pelecehan seksual di tempat kerja dan sebagainya. DAWN berpendapat bahwa organisasi semacam ini cukup berhasil memberdayakan perempuan miskin dalam situasi kehidupan pribadinya.
4. Organisasi yang ada sejak Dasawarsa Perempuan PBB dilancarkan, yang muncul dari pendanaan proyek; koperasi kredit, proyek peningkatan pendapatan dan inisiatif-inisiatif lainnya bagi perempuan miskin. Kebanyakan organisasi semacam ini mengalami kelemahan structural dan pendekatan dari atas ke bawah (top-down).
5. Organisasi kelompok akar rumput, berkaitan dengan proyek khusus dan cenderung melihat isu-isu keehatan, pemberantasan buta huruf,

kekerasan, hukum dan persoalan politik dari perspektif feminis. DAWN melihat, di satu sisi kelemahan organisasi semacam ini adalah karena bersandar kepada basis sumber daya yang tidak memadai dan dalam kenyataannya mereka cenderung memiliki keanggotaan dan perspektif kelas menengah kelas perkotaan, di sisi lain kelompok yang berhasil membangun jaringan dengan pekerja perempuan miskin akan betul-betul berpotensi.

6. Organisasi penelitian dan sumber daya, yang muncul dalam tahun terakhir ini. Organisasi semacam ini benar-benar memiliki kesempatan mempengaruhi perdebatan kebijakan umum dan memberi masukan kepada pemerintah dan lembaga donor pemberi Dana internasional. Yang menonjol, mereka berusaha keras melenyapkan jarak yang pada umumnya terjadi antara peneliti dan yang diteliti.¹⁵

3. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya sistematis dan terencana untuk melibatkan perempuan dalam berbagai program pembangunan dengan memberikan kesempatan dan peran yang sama

¹⁵ Ahdiah Indah, 2011. *Organisasi Perempuan Sebagai Modal Sosial (Studi Kasus Organisasi Nasyiatul Aisyiyah Di Sulawesi Tengah)*, hlm 09

dengan laki-laki untuk meningkatkan produktivitas, harkat dan martabat serta integritas sebagai individu anggota masyarakat¹⁶

Pemberdayaan pada kaum perempuan adalah usaha untuk meningkatkan atau mendorong kaum perempuan agar mampu meningkatkan kemampuannya. Pemberdayaan ini sangat diperlukan karena dalam kehidupan sehari-hari perempuan sering mengalami keterbatasan dalam mengaktualisasikan dirinya. Keterbatasan tersebut menyebabkan perempuan kurang dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi keluarga. Adapun keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja, hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga serta kendala tertentu yang dikenal dengan istilah “triple burden of women”, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat.¹⁷

Adapun Menurut hopsonb dan scally dalam buku pemberdayaan perempuan bahwa pemberdayaan diri dan kelompok dapat menjadi lebih berdaya dengan mempelajari/pelatihan keterampilan-keterampilan hidup (*life skilstraining*)¹⁸

¹⁶ Pamuji Imanuel A, 2013. *Pemberdayaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri Di Desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser*, hlm 12.

¹⁷ Ibid hlm 27

¹⁸ Pertiwi, 2013, *Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*, hlm 23.

Sulistiyani pada tahun 2004 menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan”. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

19

Sementara menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W pada tahun 1996 dalam H Ayu Fitri tahun 2011 mengungkapkan bahwa pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

20

Di bidang ekonomi, pemberdayaan perempuan lebih banyak ditekankan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha, khususnya dalam hal ini adalah usaha home industry. Ada lima langkah penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan kemampuan berwirausaha bagi perempuan. Menurut IMF yang dikutip oleh Herri dan kawan-kawan lima langkah tersebut yaitu:

¹⁹ Y Eli, 2012 *Konsep Pemberdayaan Perempuan*, hlm 17.

²⁰ Irma Onibala, 2014, *Peran Kepala desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, hlm 10

1. Membantu dan mendorong kaum perempuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri mereka, melalui berbagai program pelatihan.
2. Membantu kaum perempuan dalam strategi usaha dan pemasaran produk
3. Memberikan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan pemerintah terkait dengan legalitas dunia usaha
4. Mendorong dan membantu kaum perempuan untuk mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal
5. Membuat Usaha Mikro/Jaringan Usaha Mikro Perempuan/ Forum Pelatihan Usaha.²¹

Adapun program-program pemberdayaan perempuan yang ditawarkan menurut Riant Nugroho adalah:

1. Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Seperti misalnya PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), perkumpulan koperasi maupun yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol

²¹ Ibid. hlm 24

2. Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada, kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat
3. Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan
5. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.²²

Untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan maka ada 4 (empat) langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan Perempuan (Women Empowerment)

²² Riant Nugroho, 2007 *Gender*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, hlm 165

Pemberdayaan Perempuan (women empowerment) adalah sebuah proses transformasi relasi kuasa gender yang bersifat dari bawah ke atas (bottom-up) baik secara individual maupun kelompok karena berkembangnya kesadaran akan subordinasi perempuan dan terbangunnya kemampuan untuk menghadapinya.

2) Kesetaraan Gender (Gender Equality)

Kesempatan gender yang sama (Gender Equality) mengandung arti bahwa perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam kehidupan sama dengan laki-laki, termasuk kemampuan untuk berpartisipasi di arena publik. Konsep ini berasal dari feminis liberal yang menolak diskriminasi dalam hal kesempatan bagi perempuan agar perempuan bisa mendapatkan status yang setara dengan laki-laki.

3) Pemberian Peluang dan Penguatan Aksi (Affirmative Action)

Sebuah cara yang banyak direkomendasikan untuk mencapai kesetaraan kaum perempuan. Ketidaksetaraan perempuan terjadi di semua bidang akibat struktur patriarki di level publik dan privat. Dari sudut sejarah, istilah *affirmative action* diaplikasikan di level publik di mana negara dan institusi publik mengeluarkan kebijakan yang memberikan peluang atau perlakuan khusus kepada perempuan. Termasuk, kebijakan kuota di lembaga-lembaga negara dan publik: parlemen, pemerintahan, institusi pendidikan dan lapangan pekerjaan.

4) Harmonisasi atau Sinkronisasi Peraturan/Perundang-undangan dan Kebijakan (Synchronization of Regulations and Policies).

Sinkronisasi merupakan salah satu langkah untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

Adapun bentuk hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang-undang Dasar 1925
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Dengan memperhatikan hierarki di atas maka untuk menciptakan atau merancang suatu peraturan perundangan harus sesuai dengan sistematika tersebut agar terciptanya peraturan perundangan yang harmonis.²³

²³ Evie L. Fakdower, 2006 *Pemberdayaan Perempuan Biak*, hlm 17

4. PKK

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 dalam Miyanti, Ayu Julia Rachim, and Oksiana Jatningsih tahun 2015 bahwa gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, selanjutnya disingkat gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Selain itu dalam peraturan yang sama dijelaskan bahwa Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.²⁴

Menurut Aslichati dalam jurnal Organisasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan menyatakan bahwa Adapun penanggungjawab pelaksanaan program pokok

²⁴ Miyanti, A. J. R., & Jatningsih, O. 2015. *PKK Dan Pendidikan Gender: Pemahaman Dan Karakteristik Gender Ibu-Ibu Pkk Di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan, hlm 33

PKK adalah 4 (empat) kelompok kerja (Pokja) yang bersifat koordinatif satu sama lain, yaitu: ²⁵

- A. Pokja I, mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong.
- B. Pokja II, mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang pendidikan dan keterampilan.
- C. Pokja III, mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang pangan, sandang serta perumahan dan tatalaksana rumah tangga.
- D. Pokja IV, mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat suatu fenomena yang akan diteliti. Definisi konseptual ini juga digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam

²⁵ Aslichati, L. 2015. *Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan*. Jurnal Organisasi dan Manajemen, hlm 7

ilmu sosial.²⁶ Melihat penjelasan yang ada pada kerangka teori dan latar belakang masalah, maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Peran diidentifikasi sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang atau lembaga yang menduduki status tertentu.
2. Organisasi wanita merupakan suatu organisasi dengan beranggotakan wanita, yang memiliki tujuan untuk menerobos batasan yang memisahkan persoalan ketertindasan perempuan dan ketertindasan manusia secara keseluruhan juga merupakan organisasi yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam tata hubungan antar manusia yang beradab.
3. Pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya sistematis dan terencana untuk melibatkan perempuan dalam berbagai program pembangunan dengan memberikan kesempatan dan peran yang sama dengan laki-laki untuk meningkatkan produktivitas, harkat dan martabat serta integritas sebagai individu anggota masyarakat. Pemberdayaan diri dan kelompok dapat menjadi lebih berdaya dengan mempelajari atau pelatihan keterampilan-keterampilan hidup.
4. Program pokok PKK terdapat 10 poin yang dibagi menjadi 4 (empat) Pokja, Penanggungjawab program pokok PKK adalah 4 (empat) kelompok

²⁶Moleong L, *Metodelogi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, 2015. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

kerja (Pokja) yang bersifat koordinatif satu sama lain, yaitu Pokja I, mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong, Pokja II, mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang pendidikan dan keterampilan, Pokja III, mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang pangan, sandang serta perumahan dan tatalaksana rumah tangga, Pokja IV, mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah peneliti mencapai tujuan dari penelitian lapangan diperlukan definisi operasional yang menjadi alat ukur dari data yang diinginkan dalam penelitian. Berdasarkan kerangka teori terdahulu dimana menurut Azis, pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya sistematis dan terencana untuk melibatkan perempuan dalam berbagai program pembangunan dengan memberikan kesempatan dan peran yang sama dengan laki-laki untuk meningkatkan produktivitas, harkat dan martabat serta integritas sebagai individu anggota masyarakat. Selain itu penaikan ekonomi perempuan dengan adanya program-program yang mendorong kemandirian dalam hal ekonomi, dapat ditarik definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

- Pemberdayaan Perempuan

1. Pembangun dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri kaum perempuan, melalui berbagai program pelatihan.
 2. Strategi usaha dan pemasaran produk bagi kaum perempuan
 3. Pemberian pemahaman terhadap regulasi dan peraturan pemerintah terkait dengan legalitas dunia usaha
 4. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal bagi kaum perempuan
 5. Pembuatan Usaha Mikro/Jaringan Usaha Mikro Perempuan/ Forum Pelatihan Usaha.
- Program Kerja Kelompok PKK
 1. Pokja I mengelola program:
 - a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
 - b) Gotong royong
 2. Pokja II mengelola program:
 - a) Pendidikan dan Keterampilan
 - b) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
 3. Pokja III mengelola program:
 - a) Pangan
 - b) Sandang
 - c) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
 4. Pokja IV mengelola program:

- a) Kesehatan
- b) Kelestarian Lingkungan Hidup
- c) Perencanaan Sehat

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk penggambaran terhadap objek atau variabel yang diteliti, baik fenomena-fenomena yang ada dalam kenyataan, maupun faktor-faktor apa saja yang mendorong atas perilaku manusia untuk mencapai tujuannya.²⁷ Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²⁸

Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah fenomena peran PKK dalam optimalisasi kemandirian perempuan desa dan implikasinya (dampaknya) kepada masyarakat khususnya perempuan di Kelurahan Doplang, Kabupaten Purworejo.

²⁷ Moleong L, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm 31

²⁸ Zuriah, N, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Aplikasi-Teori*, Bumi Aksara, Jakarta, halaman 47.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kelurahan Doplang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo tepatnya di organisasi wanitanya yaitu PKK Kelurahan Doplang, dengan narasumber ketua PKK Kelurahan Doplang, anggota PKK Kelurahan Doplang dan masyarakat Kelurahan Doplang. Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu melihat program-program PKK Kelurahan Doplang yang mendorong untuk pengoptimalisasian kemandirian perempuan di desa tersebut, juga PKK Kelurahan Doplang termasuk PKK Kelurahan terbaik se Jawa Tengah dengan mengalahkan 8.576 desa lainnya.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²⁹ Data primer dalam penelitian ini, diperoleh dari wawancara secara langsung dengan ketua PKK Kelurahan Doplang selaku pimpinan PKK di Kelurahan Doplang, anggota PKK kelurahan Doplang dan beberapa warga Kelurahan

²⁹ Husaini Usman dan Parmono Setiady Akbar, 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Bumi Aksara, hal :58

Doplang guna mengetahui seberapa dampak dari program-program PKK ini kepada masyarakat.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari Biro Statistik, majalah, keterangan-keterangan, dan publikasi lainnya.³⁰ Data sekunder penelitian ini adalah data lapangan dengan melihat kondisi dilapangan bagaimana peran PKK Kelurahan Doplang ini dalam optimalisasi kemandirian perempuan desa lewat program-programnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi dalam menyelesaikan proposal ini adalah:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan, merekontruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.³¹ Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah

³⁰ Ibid hal 61

³¹ Moleong L, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 2013. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm 42

wawancara mendalam (depth interview) untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari ketua PKK Kelurahan Doplang selaku pimpinan PKK di Kelurahan Doplang, anggota PKK Kelurahan Doplang dan beberapa warga Kelurahan Doplang guna mengetahui seberapa dampak dari program-program PKK ini dalam mengoptimalkan kemandirian perempuan desa kepada masyarakat.

Daftar Narasumber

1. Nama : Purwaningsih Rudy P
Umur : 43 Tahun
Alamat : Gang Semar, Pangen Juru Tengah
Jabatan di PKK : Ketua PKK Kelurahan Doplang
2. Nama : Suryani
Umur : 40 Tahun
Alamat : Kelurahan Doplang, RT 3
Jabatan di PKK : Sekretaris PKK Kelurahan Doplang
3. Nama : Catur Yuniarti
Umur : 26 Tahun
Alamat : Kelurahan Doplang, RT 1
Jabatan di PKK : Anggota PKK Kelurahan Doplang
4. Nama : Trisnawati
Umur : 33 Tahun
Alamat : Kelurahan Doplang, RT 2

- Jabatan di PKK : Anggota PKK Kelurahan Doplang
5. Nama : Tuti
- Umur : 39 Tahun
- Alamat : Kelurahan Doplang, RT 4
- Jabatan di PKK : Anggota PKK Kelurahan Doplang
6. Nama : Sri
- Umur : 33 Tahun
- Alamat : Kelurahan Doplang, RT 4
- Jabatan di PKK : Anggota PKK Kelurahan Doplang
7. Nama : Karyono
- Umur : 50 Tahun
- Alamat : Kelurahan Doplang, RT 1
- Jabatan di PKK : Masyarakat Kelurahan Doplang

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai kegiatan-kegiatan dari PKK Kelurahan Doplang. Hasil penelitian dari wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.³² Dalam penelitian

³²Marzuki. 1999. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita. Hlm 56

ini dokumentasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat di pahami dalam konteksnya. Dokumentasi yang akan dilakukan adalah dokumentasi terkait foto kegiatan-kegiatan, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberi data tambahan terhadap hasil wawancara. Dalam penelitian ini dengan melihat langsung kondisi di lapangan bagaimana peran PKK Kelurahan Dopleng ini dalam pemberdayaannya terhadap perempuan desa lewat program-programnya dan dampak apa yang diberikan kepada masyarakat.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penafsiran hasil penelitian, penafsirannya meliputi perbandingan antara apa yang diprediksi di awal penelitian dan hasil yang diperoleh sesudah penelitian. Dalam proses penafsiran data biasanya berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, peneliti menafsirkan teks yang disampaikan oleh partisipan. Kedua, peneliti menyusun kembali hasil penelitian tingkat pertama dan mendapatkan tema-temanya. Ketiga, menghubungkan tema-tema tersebut sehingga membentuk teori, gagasan dan penelitian baru.³³ Berdasarkan uraian di atas

³³ Imam Suprayoga dan Tabrani, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung : PPT Rosda, hal: 191

maka teknik analisis data pada penelitian ini melewati tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dihasilkan dari proses studi pustaka, interview (wawancara) dan dokumentasi.

b. Penelitian Data

Data yang telah didapatkan kemudian dikaji dan dinilai untuk mendalami dan mengetahui keabsahan dan kesesuaian dari data primer dan data sekunder.³⁴

c. Interpretasi Data

Data yang sudah dikaji dan dinilai kemudian diinterpretasikan lewat reduksi pada penelitian ini yang disesuaikan dengan teori-teori yang dijadikan landasan penelitian.³⁵

d. Generalisasi

Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dengan cara menghubungkan hasil penelitian yang dihasilkan dari proses penelitian, bertolak dari fenomena yang terjadi di lapangan menuju

³⁴ MA. Arafat 2009. <http://digilib.uinsby.ac.id/7354/3/bab%203.pdf>. *BAB III Metode Penelitian*. (on line). 19 Desember 2016

³⁵ Sarwanno, 2006. M. J., Arikunto, M., & Arikunto, M. S. *Metode Penelitian*. Hlm 32

kesimpulan umum. Dengan harapan dapat menambah wawasan secara teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian.³⁶

³⁶ Ibid. hlm 34